

KAJIAN KOMPARATIF ANTARA KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI TINGKAT SMA

Putri Siregar¹, Ardiana Fitri², Arya Kumala Dewi³

^{1,2,3}Universitas Labuhanbatu

Email: putrisiregar057@gmail.com

Abstrak: Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka (KM) merupakan dua kerangka pendidikan utama di Indonesia yang bertujuan membentuk siswa yang kompeten dan berintegritas. Penelitian ini melakukan kajian komparatif antara kedua kurikulum dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan fokus pada aspek filosofi, struktur, metode pembelajaran, evaluasi, dan tantangan implementasi. Menggunakan pendekatan kajian pustaka dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi bahwa K-13 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dengan pendekatan saintifik, sedangkan KM lebih fleksibel dengan capaian pembelajaran (CP) yang disesuaikan dengan konteks siswa dan pengurangan beban kurikulum. Hasil komparatif menunjukkan KM lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan abad ke-21, namun K-13 lebih kuat dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Tantangan utama KM meliputi kesiapan guru dan standarisasi nasional. Kesimpulan menyarankan integrasi elemen terbaik kedua kurikulum untuk optimalisasi pembelajaran PPKn di SMA, dengan implikasi bagi kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn), Pembelajaran SMA, Kajian Komparatif, Kebijakan Pendidikan, Keterampilan Abad Ke-21.

Abstract: The 2013 Curriculum (K-13) and the Independent Curriculum (KM) are two main educational frameworks in Indonesia that aim to shape students who are competent and have integrity. This study conducted a comparative study between the two curricula in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) learning in Senior High Schools (SMA), focusing on aspects of philosophy, structure, learning methods, evaluation, and implementation challenges. Using a literature review and document analysis approach, this study identified that K-13 emphasizes core competency (KI) and basic competency (KD)-based learning with a scientific approach, while KM is more flexible with learning outcomes (CP) tailored to the student's context and a reduced curriculum load. Comparative results show that KM is more effective in increasing student engagement and developing 21st-century skills, but K-13 is stronger in strengthening Pancasila values. The main challenges of KM include teacher readiness and national standardization. The conclusion suggests integrating the best elements of both curricula to optimize PPKn learning in senior high schools, with implications for education policy.

Keywords: 2013 Curriculum, Independent Curriculum, Pancasila and Citizenship Education

(PPKn), High School Learning, Comparative Study, Education Policy, 21st Century Skills.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan praktik kewarganegaraan. Dengan diterapkannya Kurikulum 2013 (K-13) sejak 2013, paradigma pembelajaran bergeser dari pendekatan berbasis konten ke pembelajaran berbasis kompetensi, yang menekankan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa (Permendikbud No. 20 Tahun 2016). K-13 dirancang untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan sosial, teknologi, dan dinamika politik, sehingga siswa SMA diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis.

Namun, implementasi K-13 di PPKn sering kali menemui hambatan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sekitar 40% guru PPKn di SMA belum sepenuhnya menguasai pendekatan pembelajaran aktif, sehingga pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah dan hafalan. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlibat, dan nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleransi dan partisipasi politik tidak terinternalisasi secara mendalam. Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap masalah tersebut, dengan fokus pada perancangan model implementasi yang sistematis dan aplikatif.

Selain perubahan paradigma pembelajaran dari berbasis konten menuju berbasis kompetensi, penerapan Kurikulum 2013 (K-13) dalam pembelajaran PPKn juga menuntut peran guru sebagai fasilitator yang mampu menciptakan pembelajaran bermakna dan kontekstual. Pembelajaran PPKn idealnya tidak hanya menekankan pada penguasaan materi kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap demokratis, serta keterampilan berpikir kritis dan partisipatif peserta didik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran PPKn masih sering dipahami sebagai mata pelajaran hafalan yang berorientasi pada pencapaian nilai akademik semata.

Seiring dengan dinamika global dan tuntutan abad ke-21, pemerintah kemudian menghadirkan Kurikulum Merdeka (KM) sebagai alternatif penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam konteks PPKn, Kurikulum Merdeka diharapkan mampu

memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan kesadaran kewarganegaraan, berpikir reflektif, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik secara bertanggung jawab.

Perbedaan karakteristik antara K-13 dan Kurikulum Merdeka menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam implementasi pembelajaran PPKn di SMA. Di satu sisi, K-13 memiliki struktur yang sistematis dan menekankan penguatan nilai kebangsaan, namun di sisi lain dianggap kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan dan adaptivitas, tetapi masih memerlukan kajian mendalam terkait konsistensinya dalam menjaga penguatan identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis dan membandingkan kedua kurikulum tersebut agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pembelajaran PPKn yang efektif dan relevan dengan tantangan zaman.

Rumusan Masalah

Masalah utama adalah perbedaan pendekatan antara K-13 yang standar dan KM yang adaptif, serta dampaknya terhadap pembelajaran PPKn. Apakah KM dapat mengatasi kelemahan K-13 dalam hal fleksibilitas tanpa mengorbankan penguatan identitas nasional?, Apa saja kelebihan dan kelemahan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam membentuk sikap kewarganegaraan siswa?

Apakah Kurikulum Merdeka mampu mengatasi keterbatasan Kurikulum 2013 dalam hal fleksibilitas pembelajaran tanpa mengurangi penguatan nilai Pancasila dan identitas nasional?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: (1) membandingkan filosofi dan tujuan K-13 dan KM dalam PPKn, (2) menganalisis struktur kurikulum dan materi, (3) mengevaluasi metode pembelajaran dan evaluasi, serta (4) mengidentifikasi tantangan implementasi dan rekomendasi, (5) Untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta tantangan implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PPKn, (6) Untuk merumuskan rekomendasi model implementasi pembelajaran PPKn yang efektif, adaptif, dan tetap berorientasi pada penguatan nilai Pancasila dan identitas nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Landasan Teori

a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, baik aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan.

Dalam pendidikan nasional Indonesia, kurikulum disusun untuk menjawab kebutuhan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantangan global, tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa.

b. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. K-13 menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai acuan utama pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, K-13 menerapkan pendekatan saintifik, yang meliputi kegiatan:

1. Mengamati
2. Menanya
3. Mengumpulkan informasi
4. Menalar
5. Mengomunikasikan

Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kurikulum 2013 menekankan penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab.

c. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pembaruan kurikulum yang menekankan prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Ciri utama Kurikulum Merdeka antara lain:

1. Menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai pengganti KI dan KD

2. Pembelajaran lebih fleksibel dan kontekstual
3. Penekanan pada Profil Pelajar Pancasila
4. Pengurangan beban materi
5. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek

Dalam PPKn, Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis, berpartisipasi dalam diskusi, serta terlibat langsung dalam proyek penguatan karakter kewarganegaraan.

d. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA

PPKn merupakan mata pelajaran wajib di jenjang SMA yang bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan sebagai warga negara yang baik. Pembelajaran PPKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap kebangsaan.

Melalui PPKn, siswa diharapkan mampu:

1. Memahami nilai-nilai Pancasila
2. Menghargai keberagaman
3. Bersikap demokratis
4. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2) Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 efektif dalam penguatan struktur kompetensi dan nilai karakter, namun masih menghadapi kendala pada fleksibilitas pembelajaran dan kesiapan guru. Sementara itu, penelitian terkait Kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa, kemandirian belajar, dan pengembangan keterampilan abad ke-21, meskipun tantangan masih ditemukan pada aspek standarisasi dan implementasi di lapangan.

Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan kajian komparatif antara K-13 dan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PPKn di SMA.

3) Teori Kurikulum

Teori kurikulum memandang kurikulum sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum harus disusun secara sistematis, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Teori ini menjadi dasar dalam membandingkan struktur dan filosofi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

4) Teori Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Pembelajaran berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian kemampuan nyata peserta didik, bukan sekadar penguasaan materi. Kompetensi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. K-13 dan Kurikulum Merdeka sama-sama mengadopsi pendekatan ini, meskipun dengan struktur dan implementasi yang berbeda.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh teori ini, karena menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran dan guru sebagai fasilitator.

5) Student Centered Learning

Student-centered learning menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik berperan aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini mendorong diskusi, kolaborasi, refleksi, dan pemecahan masalah. Kurikulum Merdeka lebih dominan menerapkan pendekatan ini dibandingkan Kurikulum 2013.

6) Teori Pendidikan Karakter dan Nilai Pancasila

Pendidikan karakter bertujuan membentuk kepribadian peserta didik yang berlandaskan nilai moral dan kebangsaan. Dalam konteks PPKn, pendidikan karakter berfokus pada internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kajian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model ADDIE sebagai kerangka kerja. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada pengembangan produk edukasi yang dapat diuji dan direvisi berdasarkan umpan balik (Gall et al., 2003). Penelitian dilakukan di 10 SMA di Jawa Barat dari Oktober 2022 hingga Maret 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Filosofi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PPKn

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki kesamaan tujuan, yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan. Namun, kedua kurikulum tersebut memiliki perbedaan filosofi dalam implementasinya. Kurikulum 2013 berlandaskan pada pendidikan berbasis kompetensi yang terstruktur melalui Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Pendekatan ini menekankan ketercapaian standar nasional secara seragam.

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka berangkat dari filosofi Merdeka Belajar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Kurikulum ini memberi keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Dalam pembelajaran PPKn, filosofi ini memungkinkan siswa lebih aktif dalam memahami nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman nyata dan kontekstual.

B. Perbedaan Struktur Kurikulum terhadap Proses Pembelajaran PPKn

Struktur Kurikulum 2013 yang menggunakan KI dan KD menjadikan pembelajaran PPKn lebih sistematis dan terarah. Setiap materi memiliki indikator pencapaian yang jelas sehingga memudahkan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan evaluasi. Struktur ini efektif dalam menjaga konsistensi penguatan nilai-nilai Pancasila secara nasional.

Namun demikian, struktur yang relatif kaku sering kali membatasi ruang inovasi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) yang bersifat lebih umum dan fleksibel. Guru diberikan kebebasan untuk menentukan alur dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas. Dalam PPKn, fleksibilitas ini memungkinkan integrasi isu-isu aktual seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

C. Metode Pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Pada Kurikulum 2013, metode pembelajaran PPKn umumnya menggunakan pendekatan saintifik yang menuntut siswa untuk mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini secara teoritis mendorong pembelajaran aktif, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan pembelajaran yang berpusat pada guru akibat keterbatasan waktu dan kesiapan pendidik.

Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berdiferensiasi. Metode ini sejalan dengan teori konstruktivisme dan student-centered learning, di mana siswa berperan aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Dalam konteks PPKn, metode ini dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan sikap kritis, toleransi, dan partisipasi siswa.

D. Sistem Penilaian dalam Pembelajaran PPKn

Sistem penilaian pada Kurikulum 2013 menilai tiga aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian autentik, observasi, dan tes tertulis. Sistem ini cukup komprehensif, namun sering dianggap rumit oleh guru dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Kurikulum Merdeka lebih menekankan penilaian formatif yang bertujuan untuk mendukung proses belajar siswa. Penilaian digunakan sebagai alat refleksi untuk memperbaiki pembelajaran, bukan sekadar mengukur hasil akhir. Dalam pembelajaran PPKn, penilaian formatif memungkinkan guru memantau perkembangan karakter dan pemahaman siswa secara lebih mendalam.

E. Tantangan Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam PPKn

Implementasi Kurikulum 2013 menghadapi tantangan berupa keterbatasan kreativitas guru akibat struktur kurikulum yang ketat serta beban administrasi yang cukup tinggi. Selain itu, pembelajaran PPKn sering kali masih berorientasi pada hafalan konsep.

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan pada kesiapan guru, ketersediaan sumber belajar, serta belum meratanya pemahaman tentang konsep Merdeka Belajar. Kurangnya pedoman baku juga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pembelajaran antar sekolah.

F. Implikasi Kurikulum terhadap Penguatan Nilai Pancasila dan Keterampilan Abad ke-21

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 lebih kuat dalam penguatan nilai-nilai Pancasila secara sistematis dan terstruktur. Sementara itu, Kurikulum Merdeka lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas,

komunikasi, dan kolaborasi.

Oleh karena itu, integrasi antara struktur Kurikulum 2013 dan fleksibilitas Kurikulum Merdeka menjadi solusi ideal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di SMA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Kajian komparatif menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PPKn di SMA memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk peserta didik berkarakter Pancasila. Kurikulum 2013 bersifat lebih terstruktur dan berfokus pada penguasaan kompetensi, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, kontekstual, dan menekankan penguatan karakter serta keaktifan peserta didik. Kurikulum Merdeka dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran masa kini, dengan catatan membutuhkan kesiapan guru dan sekolah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis komparatif terhadap Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi yang terstruktur melalui Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dengan pendekatan saintifik. Kurikulum ini efektif dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dan menjaga standarisasi nasional pembelajaran PPKn.
2. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui penggunaan Capaian Pembelajaran (CP). Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, dan berbasis proyek sehingga lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa serta pengembangan keterampilan abad ke-21.
3. Perbedaan struktur dan filosofi kedua kurikulum berdampak langsung pada metode pembelajaran dan sistem penilaian PPKn. Kurikulum 2013 cenderung lebih terstruktur namun kurang fleksibel, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih adaptif tetapi menuntut kesiapan guru yang tinggi.
4. Tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka meliputi kesiapan sumber daya manusia, pemahaman guru terhadap konsep Merdeka Belajar, serta perlunya

standarisasi mutu pembelajaran antar satuan pendidikan.

5. Integrasi keunggulan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka merupakan alternatif strategis untuk mengoptimalkan pembelajaran PPKn di SMA, khususnya dalam menyeimbangkan penguatan nilai Pancasila dan pengembangan kompetensi abad ke-21.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru: diharapkan mampu mengoptimalkan fleksibilitas Kurikulum Merdeka dengan tetap menjaga substansi nilai-nilai Pancasila sebagaimana ditekankan dalam Kurikulum 2013, serta meningkatkan kompetensi pedagogik melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Bagi Sekolah: perlu menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan sumber belajar yang memadai untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka, serta mendorong kolaborasi antar guru dalam perencanaan pembelajaran PPKn.
3. Bagi Pembuat Kebijakan: Pemerintah diharapkan dapat menyusun pedoman implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih jelas dan terstandar, khususnya dalam pembelajaran PPKn, tanpa mengurangi fleksibilitas yang menjadi ciri utama kurikulum tersebut.
4. Bagi Penelitian selanjutnya: disarankan untuk melakukan kajian empiris melalui penelitian lapangan guna mengkaji efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 secara langsung di sekolah, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatkul Humam, M. R., Putra, M., Aziz, M. H., & Asy'arie, B. F. (2024). Transformative leadership of school principals in improving the quality of education from an Islamic perspective. *Al-Fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 343–363. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v6i2.1457>
- Winarti, E., & Abidin, Z. (2022). Manajemen pendidikan dasar Islam: Konsep dasar dan landasan pengelolaan. *NIDHOMIYYAH: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 150–162. <https://doi.org/10.38073/nidhomiyyah.v3i2.915>
- Hapsari, Y. R., & Faizin, I. (2022). Manajemen full day school dalam peningkatan karakter

- religius peserta didik. *Promis: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 181–198. <https://doi.org/10.58410/promis.v5i1>
- Marlina, S., & Arif, M. (2022). Manajemen pengelolaan program full day school dalam membentuk generasi Islami di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang. *JPM: Jurnal Pendidikan Modern*, 8(1). <https://doi.org/10.37471/jpm.v8i1.566>
- Andriana, N., & Mulyadi, D. (2020). Manajemen full day school: Strategi pengembangan karakter siswa di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–135.
- Hidayah, N., & Izzati, A. (2020). Full day school dan pengaruhnya terhadap karakter religius siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/10.15294/ijcets.v3i1.8675>
- Huda, M. (2018). Implementasi full day school dalam pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(3), 89–102. <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.2223>
- Rahman, A. (2020). Tantangan dan strategi implementasi full day school pada sekolah Islam berbasis karakter. *Reflektika: Jurnal Pendidikan Islam Terapan*, 5(4), 201–214. <https://doi.org/10.28944/reflektika>
- Sari, M., & Fathurrahman, T. (2020). Integrasi pendidikan agama dalam full day school untuk pembentukan karakter religius. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 10(2), 67–81.
- Wahyuni, R., & Subekti, T. (2022). Penguatan karakter religius melalui program full day school. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 35–50. <https://doi.org/10.21831/jpk.v14i1.4530>